

NOTULENSI RAPAT

Agenda : Kunjungan Kerja ke Kementerian Dalam Negeri RI
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juli 2025
Pukul : 11.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Atwil)
Pimpinan Rapat : Ir. H. Ahmad Yani, ST, SE, M.Si, IPM
Peserta Rapat :

- Ditjen Toponimi
- Ditjen Pemdes
- Perwakilan Ditjen Bina Adwil Mendagri
- Wakil Ketua DPRD Kab Kutai Kartanegara
- Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara
- Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara
- Kabag Hukum Pemda Kab Kutai Kartanegara
- Dinas Pemdes Kab Kutai Kartanegara
- Staf DPRD Kab Kutai Kartanegara
- Tenaga Ahli DPRD Kab Kutai Kartanegara

Kegiatan	
Pak Teguh Perwakilan Direktur Ditjen Adiministrasi dan Wilayah Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none">- Kami ucapkan selamat datang di Ditjen Bina Atwil- Kami sudah mendapat informasi sebelumnya terkait kedatangan bapak ibu dari DPRD Kab Kutai Kartanegara beserat Pemerintah Daerah Kab Kutai Kartanegara
Ketua DPRD Kukar Bapak Ir. H. Ahmad Yani, ST, SE, M.Si, IPM	: <ul style="list-style-type: none">- Ketua DPRD Kab Kutai Kartanegara memperkenalkan seluruh anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara yang hadir dari Pansus Pembentukan 7 desa wilayah Kab Kutai Kartanegara, di Kab Kutai Kartanegara ada 45 Anggota DPRD.- Ketua Pansus 1 Desman Minang- Wakil Ketua Pansus 2 Sopan Sopian- Wakil Ketua Pansus 3 Agustinus- Wakil Ketua Pansus 4 Syafruddin- Kunjungan kami ke Ditjen Bina Adwil Mendagri ini tujuan nya berkonsultasi dan untuk mendapatkan

		<p>informasi dari Ditjen Bina Adwil Mendagri terkait pemekaran yang ada di Kab Kutai Kartanegar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan jumlah penduduk bisa jumlah orang atau jumlah KK yaitu 1.500 orang atau 300 KK
Pak Teguh Perwakilan Ditjen Bina Adwil Mendagri		<ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Bina Adwil Mendagri dan Ditjen Bina Pemdes yang bekerja untuk melakukan pemekaran desa - Ditjen Bina Pemdes yang melakukan verifikasi terkait pembentukan desa pada diawal kemudian setelah verifikasi Pemdes baru Ditjen Bina Adwil Mendagri yang memberikan kode resgitrasi - Desa yang belum dapat kode register dari Mendagri boleh saja melakukan perubahan Perbup dalam perubahan batas wilayah - Terkait dengan anggaran desa, desa yang mendapat anggaran dari APBN diberikan setelah sudah mendapatkan kode registrasi dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Agustinus)		<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan kami ke Kemendagri ini harapannya dapat dipercepat dalam proses persetujuannya - 7 Desa ini sudah siap dalam proses pembentukannya sehingga segera dapat di setujui
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Sugeng)		<ul style="list-style-type: none"> - Saya mewakili pansus desa Sumber Rejo berharap segera mendapatkan persetujuan dari Kemendagri
Kabag Hukum Kab Kutai Kartanegara		<ul style="list-style-type: none"> - Selain perubahan batas wilayah, apakah perubahan nama juga bisa dilakukan sebelum mendapat kode resgiter dari Kemendagri? -
Sekretaris DPMD Kab Kutai Kartanegara		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ada komitmen dari Bapak Bupati kalo bisa sebelum 1 tahun bisa menjadi desa definitif, - Masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum mengajukan permohonan ke Kemendagri - Pada saat ini masih ada permasalahan kecil di desa yaitu tentang batas wilayah antara desa induk dengan desa persiapan - Terkait DIB apakah ada pendampingan dari

		Kemendagri?
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Pak Sopan Sopian)	-	Setelah proses di Kabupaten selesai kemudian diajukan permohonan ke Kemendari, berapa lama waktunya hingga dapat Kode Registrasi
	-	
Ditjen Bina Adwil	-	Kami menerima rekomendasi dari Ditjen Pemdes jika sudah ada rekomendasi maka kami akan memberikan rekomendasi untuk kode resitrasi
	-	Untuk wilayah Kab Kutai Kartanegara menjadi salah satu perhatian kami terkait ada beberapa wilayah yang masuk ke IKN sehingga kami mencoba untuk merasa tidak ada kehilangan di Kab Kutai Kartanegara
Ditjen Pemdes Bu Ayu	-	Pada saat ini proses pemekaran desa dapat dilanjutkan karena proses monotorium sudah selesai, namun saat ini kami belum mendapatkan info apakah 7 desa ini masih di Kabupaten atau sudah masuk ke Provinsi
	-	Ada 3 desa Usia Desa nya 1 tahun, persiapan maksimal 3 tahun ada 4 desa berumur 1 semester
	-	Ada syarat utama yang harus dipenuhi yaitu jumlah penduduk yaitu 1.500 pendduduk atau 300 KK, jika jumlah penduduk tidak terpenuhi jangan diajukan ke tahap selanjutnya
	-	Batas wilayah harus sudah selesai dan harus sudah dalam bentuk Peraturan Bupati
	-	Terkait batas segmen nya apakah sudah Permendagri, jika belum sesuai segmen Permendari maka tidak akan dapat kode register desa
	-	Peran BIG, untuk menyelesaikan batas wilayah wajib berkoordinasi dengan BIG terkait peta dasar, hasil penyelesaian batas wilayah dikembalikan ke BIG, nanti BIG akan mengeluarkan surat terkait batas wilayah sudah fix tidak ada permasalahan.
	-	Tim Ahli memastikan dalam kajian terkait syarata harus terjawab dalam kajian, misalnya alasan utama pemekaran, pembagian aset desa bagaimana, Pemkab mampu tidak membayar dana desa jika sudah pemekaran.
	-	Penuhi semua cek lis persyaratan pembentukan desa, setelah terpenuhi disampaikan ke

		Pemerintah Provinsi, setelah itu nanti Pemerintah Provinsi menyampaikan ke Kemendagri, jadi Pemerintah Kabupaten tidak bisa langsung ke Kemendagri.
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Bu Hamdiah)		<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan kami ke Kemedagri berharap ada proses yang dimudahkan dalam pembentukan desa baru - Banyak Masyarakat yang menunggu dan berharap dengan adanya pembentukan desa baru ini tujuannya agar mempermudah pelayanan yang ada di desa baru.
Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara (Bu Erwin)		<ul style="list-style-type: none"> - Pada intinya kami hanya ingin mendapatkan informasi terkait persyaratan pembentukan desa baru, kebetulan ada di Kemendagri kami meminta penjelasan pembentukan Kabupaten baru
Ditjen Pemdes Bu Ayu		<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah yang sifatnya strategis dan Khusus dapat dibentuk desa baru hal ini menjawab pertanyaan desa yang masuk ke wilayah IKN sehingga desa awal penduduknya berkurang nanti coba di kaji kembali PP 43 tahun 2014 dan Permendagri 1 Tahun 2017 - Teman-teman Kab Kutai Kartanegara yang ingin berkonsultasi ke Ditjen Pemdes Mendagri sangat bisa dan kami membuka ruang seleuas-luasnya.
PENUTUP		